

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adi, R. (2004). Metode penelitian sosial dan hukum. Jakarta: PT Grafika.
- Andi Hamzah. (2023). Hukum acara pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, M. I. (2021). Pertimbangan yuridis putusan bebas & upaya hukum kasasi perkara pidana. Jakarta: MCL Publisher.
- Askin, M., & Masidin. (2023). Penelitian hukum normatif: Analisis putusan hakim. Jakarta: Prenada Media.
- Hidayat, A. (2023). Keamanan siber dan tantangan perlindungan data pribadi di Indonesia. Jakarta: Pustaka Digital.
- Karunia, A. A. (2022). Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia dalam perspektif teori Lawrence M. Friedman. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, 10(1), 115-128.
- Nurjanah, D. H., Fatmawati, & Dhanarto, P. A. Y. (2024). Pendidikan anti korupsi: Mengembangkan pendidikan anti korupsi sejak dini. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Puspito, N. T., Elwina, M., & Kurniadi, Y. (2011). Pendidikan anti-korupsi di perguruan tinggi. Bandung: Institut Teknologi Bandung.
- Rawls, J. (1971). A theory of justice. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Rose-Ackerman, S. (1999). Corruption: A study in political economy. New York: Academic Press.
- Setiawan, D. (2023). Literasi digital sebagai upaya pencegahan kejahatan siber. Bandung: Informatika.

Sulistiani, S., Hafrida, H., & Monita, Y. (2023). Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan lepas (onslag) terhadap pelaku tindak pidana korupsi. *Pampas: Journal of Criminal Law*, 4(1), 62-73.

Sudarto. (1986). *Hukum dan hukum pidana*. Bandung: Alumni.

Universitas Batanghari. (2021). *Buku Panduan Universitas Batanghari*. Jambi: Universitas Batanghari.

Yahya Harahap. (2022). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Penyidikan dan penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

C. Jurnal

- Arti, N. D. B., & Rizky, R. Y. (2023). Tantangan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.
- Dewa, I. M. (2022). Peran penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi sektor pendidikan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pendidikan*, 13(2), 89-104.
- Ihsan, M., et al. (2024). Penyuluhan perlindungan hukum data pribadi dalam penyelenggaraan fintech di Desa Percut Sei Tuan. *JUDIMAS*, 5(1).
- Loventa, R. M. (2021). Analisis putusan pengadilan negeri kasus tindak pidana korupsi oleh Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pid. Sus. TPK/2017/PN. Mdn). *CoMBInES-Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences*, 1(1).
- Pattimahu, S. F., et al. (2024). Analisis penerapan asset recovery dalam tindak pidana korupsi untuk pengembalian kerugian negara. *Jurnal Anti Korupsi*, 4(2), 82-95.
- Putri, D. (2021). Korupsi dan perilaku koruptif. *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, 5(2).
- Rahayu, P., & Suaidah, S. (2022). Penerapan metode smart sistem penunjang keputusan untuk penerimaan siswa baru (Studi kasus: SMP PGRI 2 Katibung Lam-Sel). *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi*, 3(3).
- Rajab, I. F. (2023). Penegakan hukum undang-undang korupsi terhadap pemberantasan korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan penyelenggara negara. Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan.
- Ramadhan, H. A., Yusrizal, Y., & Aksa, F. N. (2021). Tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana dan hukum pidana Islam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 4(2), 21-29.

Suryanto, A. F. B. (2021). Penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi suap menyuap dan gratifikasi di Indonesia. Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum FHUI, 1(2), 4.

D. Internet

BBC News. (2023). AI deepfake scam tricks company into handing over \$25m. Diakses dari <https://www.bbc.com>.

CNN Indonesia. (2021). Kasus pemalsuan e-KTP di Jambi dan tantangan keamanan data kependudukan. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com>.

Hukumonline. (2023). Analisis perlindungan data pribadi dalam sistem informasi di Indonesia/ Perlindungan data pribadi di Indonesia: Perspektif hukum dan teknologi.

Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2022). Tantangan keamanan siber di Indonesia. Diakses dari <https://www.kominfo.go.id>.

Reuters. (2019). Facebook data breach exposes information of 530 million users. Diakses dari <https://www.reuters.com>.

Transparency International. (2024). Laporan tahunan tentang korupsi global.

